



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	33 (Tiga Puluh Tiga)
Tahun Sidang	:	2023-2024
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI.
Hari, Tanggal	:	Rabu, 10 Juli 2024
Pukul	:	19.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka.
Pimpinan Rapat	:	M. Sarmuji, S.E, M.Si/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I It 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270.
A c a r a	:	Pembahasan mengenai : <ol style="list-style-type: none">1. Pengambilan Keputusan terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2025;2. Progress Pembentukan Holding BUMN Karya.
Hadir	:	<ol style="list-style-type: none">1. 27 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI;2. Menteri BUMN RI, Sdr. Erick Thohir; Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI beserta jajarannya pada Pukul 20.26 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 10 Juli 2024, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak M. Sarmuji, S.E., M.Si.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan atas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2025 dan *monitoring* atas Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2020 hingga 2024.
2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2025 dari Kementerian BUMN RI dengan perincian sebagai berikut:
 - a. PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp.13.868.000.000.000,- (*Tiga Belas Triliun Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Rupiah*) dalam rangka melanjutkan pembangunan JTTS Fase 2 dan 3.
 - b. PT Asabri (Persero) sebesar Rp.3.610.000.000.000,- (*Tiga Triliun Enam Ratus Sepuluh Miliar Rupiah*) dalam rangka perbaikan permodalan.
 - c. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp.3.000.000.000.000,- (*Tiga Triliun Rupiah*) dalam rangka program listrik desa.
 - d. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp.3.000.000.000.000,- (*Tiga Triliun Rupiah*) untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR, dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IJP KUR.
 - e. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp.2.500.000.000.000,- (*Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*) dalam rangka pengadaan kapal baru.
 - f. PT BioFarma (Persero) sebesar Rp.2.212.000.000.000,- (*Dua Triliun Dua Ratus Dua Belas Miliar Rupiah*) dalam rangka fasilitas *capital expenditure* baru.
 - g. PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp.2.096.000.000.000,- (*Dua Triliun Sembilan Puluh Enam Miliar Rupiah*) dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja.
 - h. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (*Dua Triliun Rupiah*) dalam rangka perbaikan struktur permodalan.
 - i. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (*Dua Triliun Rupiah*) dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.
 - j. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp. Rp.2.000.000.000.000,- (*Dua Triliun Rupiah*) dalam rangka pengembangan usaha.
 - k. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp.1.800.000.000.000,- (*Satu Triliun Delapan Ratus Miliar Rupiah*) dalam rangka pengadaan *train set* baru penugasan pemerintah.
 - l. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1.624.000.000.000,- (*Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Empat Miliar Rupiah*) dalam rangka modal kerja program CPP.

- m. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar Rp.1.563.000.000.000,- (*Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Rupiah*) dalam rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.
 - n. Perum DAMRI sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (*Satu Triliun Rupiah*) dalam rangka penyediaan bus listrik dan bus diesel.
 - o. Perum Perumnas sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (*Satu Triliun Rupiah*) dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan.
 - p. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp.976.000.000.000 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar*) dalam rangka pembuatan kereta KRL.
3. Komisi VI DPR RI meminta Menteri BUMN RI untuk memberi perhatian terhadap masukan dan catatan yang diberikan tiap Poksi Komisi VI DPR RI terkait usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2025.
4. Komisi VI DPR RI akan memonitor dan meminta Menteri BUMN RI untuk memastikan agar PMN dipergunakan secara produktif, efektif, dan efisien bagi peningkatan kinerja korporasi BUMN sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
5. Catatan masing-masing Poksi Komisi VI DPR RI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesimpulan Rapat Kerja ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 21.36 WIB.

MENTERI BUMN RI

Ttd.

ERICK THOHIR

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

M. SARMUJI, S.E., M.Si.

A-318